

PENGUNGAN INTERNET DAN PERUBAHAN NORMA KEWARGANEGARAAN DALAM ERA TRANSISI KE DEMOKRASI DI INDONESIA**NAJMUDDIN MOHAMMAD RASUL****Dosen Universitas Andalas, Padang. Mahasiswa Ph.D. Komunikasi Politik
Jabatan Media dan Komunikasi, FSSK, UKM****Prof. Dr. SAMSUDIN A. RAHIM****Jabatan Media dan Komunikasi, FSSK, UKM****ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine whether internet use correlate to change of citizenship norms in the context of Indonesia's transition to democracy. The main theoretical framework is media and social change. For data gathering, 384 young voters between the ages of 17 to 40 years were interviewed in Padang, West Sumatra, Indonesia. The results of the study show that internet use has a significant correlation with citizenship norms (compliance, duty, and engaged citizenship). Based on the findings it can be concluded that the political euphoria in the era of transition to democracy has changed pattern of media usage and citizenship norms among the young generation in Indonesia.

Key Words: Internet, Norma kewarganegaraan, tanggungjawab, keterlibatan, pematuhan, demokrasi

1. PENGANTAR

Abad ke 20 disebut sebagai abad demokrasi, sebab pada penghujung abad ke 20 ini berlaku perubahan peta politik dan komunikasi politik dunia. Perubahan peta politik itu disebut sebagai gelombang ketiga demokrasi (Huntington 1991). Gelombang ke tiga demokrasi ini bermula pada pertengahan tahun 1970-an di Portugal dan kemudiannya berkembang di pelbagai belahan dunia dari Eropah Selatan, Eropah Timur, Amerika Latin, Afrika dan Asia termasuk rantau Asia Tenggara. Keruntuhan sistem politik dari non demokratik kepada sistem politik demokratik disebut Fukuyama (1992) sebagai “akhir dari sejarah” (*the end of history*). Gelombang ke tiga demokrasi itu, melahirkan transisi ke demokrasi, iaitu perubahan dari rezim diktator kepada sistem demokrasi (Doorenspleet 2006).¹

¹ Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*, New York: Free Press.

Sejalan dengan gelombang ke tiga demokrasi, dunia komunikasi politik juga memasuki gelombang ketiga komunikasi politik (Vacari 2008). Perubahan komunikasi politik ini disokong dengan kemajuan sains teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan globalisasi yang melanda seluruh kawasan dunia. Kemajuan sains teknologi komunikasi dan informasi dan globalisasi mendorong lahirnya gelombang ketiga komunikasi politik (Theocharis, 2011). Masyarakat yang selama ini menggunakan media tradisional (Surat kabar dan televisi) sebagai sumber informasi politik berubah dan berkembang menjadi masyarakat yang *technoculture*, iaitu masyarakat yang berbudaya teknologi. Masyarakat *technoculture* menjadikan media digital (internet) sebagai gaya hidup. Perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh internet dan media digital pada umumnya yang berkembang sangat pesat pada akhir abad ke 20 ini (Dean, 2012).

Gelombang ketiga komunikasi mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Media menyokong generasi muda mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan dengan cepat, sehingga mereka menjadi masyarakat yang memiliki dan memahami informasi lebih banyak (*wellinformed*), lalu mereka membuat jaringan sesama komuniti atau masyarakat berjejaring (*networking societies*). Oleh itu, generasi muda sekarang dikenal sebagai generasi cyber atau generasi digital.

Dalam era transisi ke demokrasi ini, isu media, kewarganegaraan dan partisipasi politik menjadi isu utama dalam kalangan pakar dan pemerhati komunikasi politik (Dalton 2008).² Oleh itu, ketiga isu tersebut menjadi magnitude bagi ramai pakar untuk melakukan penyelidikan dan perbincangan di peringkat antara bangsa. Media sebagai pilar ke empat bukan hanya sebagai sarana komunikasi tetapi memiliki peranan penting dalam proses demokrasi (Votmer 2006).³ Sedangkan kewarganegaraan adalah isu strategik dalam proses demokratisasi dan memiliki hubungkait yang sangat erat dengan partisipasi politik. Kemajuan sains teknologi komunikasi dan informasi ini telah mempengaruhi kepemilikan dan pola penggunaan media iaitu dari media lama (surat kabar dan televisi) kepada media baru yang berasaskan internet.

² Dalton, R. J. (2008a). Citizenship norms and the expansion of political participation. *Political Studies*, Washington, DC: CQ Press. (56). 76-98.

³ Voltmer, K., (2008). *Mass Media and Political Communication in New Democracies*. Routledge. London.

Sebenarnya, dalam politik, peranan internet telah memainkan peranannya dengan memfasilitasi warga muda untuk aktif menyuarakan pendapat dan pandangan berbeza. Malah internet dipercaya oleh warga muda sebagai sumber informasi yang dipercaya, karena internet dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat. Oleh itu, banyak generasi muda membuat blok pribadi, e-mail, facebook, twitter sebagai sarana partisipasi politik dan menggunakan aplikasi mesin pencari seperti google untuk mencari dan mengumpulkan informasi termasuk informasi politik. Dewasa ini, generasi muda aktif melayari internet untuk mencari pelbagai keperluan seperti keperluan politik dan bisnis serta peluang kerja. Internet bukan hanya media hiburan tetapi telah menjadi sarana komunikasi dan informasi politik (Hindman, 2009). Oleh itu, media internet telah menjadi lapangan kajian komunikasi politik dalam abad moden ini (Bakker dan Vreese, 2011; McNair 2011; Quintelier&Visser, 2008; Scheufele&Nisbet, 2002; Shah, McLeod &Yoon, 2001, Tolbert dan McNeal, 2003).

Fenomena di atas, menunjukkan bahwa landskap komunikasi politik semakin bergolak, terfragmentasi, lebih personal, desentralisasi, lebih profesional, warga menjadi lebih menampilkan sikap sinis terhadap politik, dan tidak mahu menjadi ahli partai politik. Pelbagai perubahan sikap generasi muda dalam abad moden ini sangat dipengaruhi oleh media, utamanya media internet (Blumler dan Kavanagh dalam Vaccari, 2008). Media lama dan baru (internet) mempengaruhi institusi-institusi demokrasi dan terlibat dalam proses demokrasi (Veltmer, 2006).⁴ Perubahan peta politik tersebut semakin memperkokoh posisi media sebagai pilar ke empat (*fourth estate*) setelah lembaga-lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif (Curran, 1991). Bahkan dalam proses transisi ke demokrasi, media dapat mengisi kekurangan dan menguatkan proses demokrasi (Curran dan park, 2000; Downing, 1996; Paley et al. 1995; Splichal 1994).

Aktivitas politik maya dengan menggunakan internet, membuat komuniti cenderung tertarik dengan isu-isu spesifik dan ide politik yang dapat membangkitkan kesadaran politik warga. Media internet dapat melakukan transformasi informasi besar dan mempercepat perubahan proses komunikasi politik (Farrell dan Webb 2000; Norris 2000). Internet dan media social lainnya seperti facebook, twitter, e-mail dan lain-lain dimanfaatkan warga muda sebagai forum diskusi dan debat politik, membuat opini dan

⁴ Ibid.

berkongsi informasi. Walaupun diakui tidak semua orang dapat akses kepada internet, karena masalah ekonomi, tingkat pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya (Sylvester dan McGlynn 2010).

Bimber, Flanagan dan Stohl (2005), mengatakan bahwa teknologi komunikasi dan media baru berfungsi sebagai penghubung antara domain swasta dan publik. Media berbasis teknologi baru dapat membantu mengekspresikan diri dan memperoleh informasi jauh lebih mudah dari masa sebelumnya dan dapat menjadi instrument dari dimensi partisipasi politik. Mengikut Dahlgren (2005), politik bukan hanya sebuah instrumen aktivitas untuk meraih tujuan, tetapi politik sebuah aktivitas yang bersifat ekspresif, sebuah cara yang jelas dalam ruang awam.

Namun kemajuan sains dan teknologi maklumat ini melahirkan kesenjangan antara generasi muda dengan elit politik. Pada satu sisi, generasi muda sudah faham menggunakan dan menafaatkan teknologi, pada sisi lain ramai elit politik yang kurang faham teknologi, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan media ini untuk berkomunikasi dengan warga. Padahal internet dapat membantu elit politik untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen, membangun citra politik dengan mudah dan kos murah (Craig, 2012; Dionne, 1991; Hibbing dan Theis-Morse, 2002; Wattenberg 2002).

Selanjutnya, kemajuan sains teknologi komunikasi dan informasi dan globalisasi semakin berkesan kepada generasi muda. Globalisasi ditandai dengan adanya integrasi politik dunia, ekonomi dan struktur yang saling berkaitan dan bergantung. Dunia bagaikan sebuah desa dunia (*global village*) yang sudah terkoneksi melalui media internet (Luhan, 2010). Aktor politik dalam era global ini menurut Lilleker (2006) mesti berfikir dan berperilaku yang bernuansa global, namun tetap bertindak lokal (*think globally act locally*). Gaya hidup warga dunia merupakan ciri utama globalisasi. Negara-negara hanya dibatasi oleh batas teritorial sahaja. Budaya dan peradaban sebuah bangsa terkontaminasi oleh perubahan.

Perubahan peta politik dan komunikasi politik turut mempengaruhi norma kewarganegaraan dalam kalangan generasi muda. Norma kewarganegaraan sebagai satu set hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara turut mengalami perubahan telah dibincangkan semenjak Aristotle dan Plato. Dalam sebuah negara demokrasi masalah kewarganegaraan menjadi isu penting, karena ianya memiliki peranan penting dalam proses pendemokrasian. Warga negara (citizen) bukan hanya

sekedar penonton, bukan pula subjek, tetapi warga negara memiliki rasa tanggungjawab terhadap proses demokrasi dengan cara ikut mengundi, ta'at membayar pajak dan berpartisipasi dalam partai politik, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi, membangun karakter bangsa serta melaporkan setiap adanya pelanggaran hukum (Dalton 2008). Warga negara memiliki hak dan tanggungjawab dan dijamin oleh konstitusi negara. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep citizen yang dikemukakan oleh Marshal (1950) iaitu; hak-hak civil, politik dan social warga negara. Sedangkan Zamudio (2004), mengemukakan tiga dimensi citizenship, iaitu; status sebagai warga negara, memiliki rasa kebersamaan dan kesadaran yang tinggi (exercise dan conscience).

Manakala Dalton (2008)⁵ melihat perubahan norma kewarganegaraan dari norma tanggungjawab yang berorientasi pada nilai-nilai tradisional seperti pemungutan suara, ta'at dan mematuhi undang-undang, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, memiliki rasa tanggungjawab, dan menghormati etika dan moral berubah kepada nilai baru atau norma keterlibatan kewarganegaraan yang bersifat langsung, lebih berorientasi pada nilai-nilai keterbukaan seperti membuat opini di media, melakukan protes terhadap polisi pemerintah dan sebagainya. Perubahan norma ini berimpak kepada sikap dan perilaku politik generasi muda.

Umumnya aktivitas norma keterlibatan kewarganegaraan mengikut Theocharis (2011) lebih bersifat extra-institutional dan berorientasikan sivik. Perubahan pola aktivitas ini menurut Franklin (2004); Dalton dan Wattenberg (2000); Putnam, (2000); Lawson dan Merkle, (1998) dapat penurunan minat warga untuk ikut mengundi dalam pemilu, penurunan minat menjadi ahli partai politik, bahkan berlaku penurunan kepercayaan modal sosial. Dalam norma keterlibatan kewarganegaraan ini, aktivitas warga sama dengan aktivitas warganegara dalam era post-materialism (Inglehart dan Welzel, 2005) iaitu aktivitas langsung yang mencakupi nilai-nilai kuasa diri. Perubahan pola dan aksi politik dalam era transisi ke demokrasi ini menurut Jacobsen dan Linkow (2012) dan Dalton (2008), berhubungkait dengan semakin tinggi tingkat pendidikan warga dan semakin membaiknya ekonomi warga.

⁵ Dalton, R. J. (2008a). Citizenship norms and the expansion of political participation. *Political Studies*, Washington, DC: CQ Press. (56). 76-98.

Disamping dua dimensi di atas, penyelidik menambahkan satu dimensi yang berhubungkait dengan fenomena dan dilema dalam proses demokrasi. Dilema demokrasi tersebut disebut Mann (2004) sebagai sisi gelap demokrasi (*the side dark of democracy*). Sedangkan Zmerli (2009) menyebutnya dengan sisi gelap daripada modal sosial. Sisi gelap demokrasi tersebut dapat melahirkan sebuah dilema dalam proses pendemokrasian. Bahkan menurut Lilleker (2006) kondisi tersebut dapat memunculkan sikap sinis warga terhadap pemerintah, ketidakyakinan, dan ketidakpercayaan serta skeptisme warga terhadap elit (*Cynicism relates to disbelief, mistrust and scepticism*). Dimensi ini disebut dengan norma pematuhan kewarganegaraan. Dimensi ini berhubungkait dengan faktor luaran seperti adanya intimidasi, tekanan, politik wang dan keterlibatan keluarga dalam pemilu. Ketiga sub dimensi ini saling terkait dan memberikan konstribusi positif kepada proses pendemokrasian.

Perubahan norma dalam kalangan generasi muda tersebut berimpak kepada sikap dan pola partaisipasi politik, iaitu dari partaisipasi politik tradisional kepada partaisipasi politik moden dan politik sivik yang berorientasi kepada keterlibatan dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat sivil dalam organisasi. (Blumler dan Kavanagh, 1999; Farrell dan Webb, 2000; Norris, 2000). Partaisipasi dalam demokrasi adalah sesuatu yang penting, karena ianya sangat mempengaruhi kualitas sesebuah negara demokrasi. Verba dan Nie, (1972) menyebut partaisipasi politik sebagai *cornerstone* dan jantung demokrasi.⁶ Pendapat tersebut disokong oleh Helander (2012), bahwa partaisipasi politik adalah prasyarat utama dalam sebuah negara demokrasi. Begitu pentingnya partaisipasi dalam negara demokrasi, Sylvester dan McGlynn, (2010) mengatakan demokrasi tidak akan memiliki makna apa-apa dan legitimasi tanpa adanya partaisipasi warga dalam proses demokrasi. Partaisipasi warga memiliki hubungan erat dengan budaya dan norma satu bangsa. Hal ini dikukuhkan oleh pandangan Almond dan Verba, (1963); Barnes et al. (1979); Verba dan Nie, (1972), bahwa partaisipasi warga dalam demokrasi berhubungkait dengan budaya politik suatu bangsa. Oleh itu, budaya politik dapat mendorong warga untuk berpartaisipasi, misalnya warga Amerika aktif terlibat dalam perkumpulan sukarela, terlibat dalam diskusi politik dan masalah-masalah politik lainnya.

⁶ Verba, S., & Nie, N. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. New York: Harper & Row.

2. INTERNET DAN POLITIK

2.1 Media sebagai lembaga demokrasi

Media memiliki makna yang sangat penting dalam dunia politik (McNair 2011). Hal ini karena media adalah hubungan antara (word) kata dengan dunia (world). Oleh itu, komunikasi politik dalam negara yang menganut sistem politik demokratis lebih menekankan pada peranan media dalam aktivitas politik. Bahkan para ahli komunikasi menyatakan bahwa media massa merupakan pilar ke empat (*fourth estate*), setelah eksekutif, *legislative* dan *yudikatif* dalam pemikiran Trias Politika, Montesque. Hal ini juga ditegaskan oleh Thomas Carlyle (1907), iaitu “*the media is a power, a branch of government with a inalienable weight in law-making, derive from the will of the people*”.

James Curren (2002) menyatakan ada tiga peran media massa dalam sistem politik demokrasi iaitu, pertama sebagai *watchdog*, ertinya media harus memonitor semua aktivitas Negara dan berani mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan. Agar peran ini optimum maka diperlukan adanya *free market* dan pelanggaran kawalan atau *deregulation* untuk media. Kedua, *information and debate*, media mesti mampu memberikan saluran komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Untuk itu, media harus membuat forum dialog (*a forum of debate*) di mana rakyat dapat mengidentifikasi masalah, mengajukan solusi, membuat kesepakatan dan memandu arah masyarakat (*to guide the public direction of society*). Ketiga, *voice of the people*; media mengantarkan kepentingan rakyat kepada pemerintah, peran ini merupakan puncak kerjayanya daripada misi media. Media berbicara untuk rakyat dan representasi pandangan dan kepentingan rakyat dalam wilayah publik (*public domain*).

Sejalan dengan pandangan di atas, Voltmer (2006) menjelaskan bahwa media sebagai lembaga politik (*political institution*) memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai *the marketplace of ideas*; media menjadi sarana debat publik yang efektif dalam mencari serta memberi kontribusi yang positif. Mengikut hujah McQuail (1986); Dahl (1989); Napoly (1999) dan Voltmer (2006) bahwa ‘*marketplace of ideas*’ tempat aktor melakukan transaksi komunikasi publik. Oleh itu, *marketplace of ideas* diperlukan dalam proses transisi menuju demokrasi.

Kedua, media sebagai transformasi informasi (*to informe*). Bagi warga di negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi, mereka menghadapi tantangan dalam

memperoleh informasi mulai dari faktor administratif sampai dengan pelayanan publik oleh lembaga-lembaga pemerintah yang masih warisan rejim lama. Sementara itu, lembaga-lembaga politik seperti partai politik telah kehilangan kepercayaan daripada publik. Hanya media sebagai transformasi informasi yang tersisa sebagai sumber utama di mana warga negara dapat memperoleh informasi yang mereka perlukan untuk mengambil bagian dalam kehidupan publik. Oleh itu media mesti memberikan Informasi yang berkualitas untuk membantu warga menentukan pilihannya dalam pemilu. Hal ini karena kualitas informasi yang dimiliki warga berdampak serius terhadap legitimasi pemilu yang demokratis. Apatah lagi, kualitas keputusan politik yang demokratik sangat ditentukan oleh informasi yang disediakan oleh media sebagai pemberi informasi (*to inform*). Mengikut pandangan Lemert (1989) media juga memiliki potensi untuk memperkuat identiti politik dan mendorong partisipasi warga maka media mesti berkomitmen untuk 'memobilisasi informasi' dengan sebaik-bakinya. Media mesti menyajikan informasi yang komprehensif dan netral dan tidak menyajikan semua sisi kontroversi, serta kehendak politisi.

Curran (1991) menjelaskan bahwa fungsi media yang ketiga sebagai lembaga demokrasi bertindak sebagai pengawas (*watchdog*) atau tonggak keempat (*fourth estate*) yang membuat autoriti politik yang boleh dipercaya. Media melakukan pengawasan (*memonitor*) dan menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan politik. Konsep 'tonggak keempat' ini menurut Kelley dan Donway (1990) ialah berkaitan dengan prinsip pembahagian kekuasaan yang berkembang selama abad kelapan belas sebagai upaya untuk mengekang kuasa negara secara mutlak. Beberapa penulis bahkan berpendapat bahwa fungsi kawalan media lebih penting daripada fungsi informasi mereka karena melindungi warga negara daripada campur tangan negara dalam kebebasan individu. Dalam konteks transisi menuju demokrasi, negara-negara demokrasi baru sering mengalami krisis kepercayaan sehingga berpengaruh pada pelaksanaan roda pemerintahan. Bahkan, negara-negara demokrasi baru itu terkadang sangat rapuh dan memiliki risiko dalam menjalankan pemerintahan akibat rendahnya kepercayaan publik. Oleh itu, peran media sebagai pengawas tidak dapat dikesampingkan. Sebab media dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan mekanisme dan akuntabiliti serta dapat membantu pemerintah transisi memperbaiki kepercayaan.

Di lain sisi, hubungan antara media dan negara dalam negara demokrasi baru lebih kompleks bahkan pada saat yang sama, menurut Morris dan Waisbord (2001); Harge *et.al.* (2002) media sendiri sering tidak dapat bertahan hidup tanpa subsidi Negara. Hal ini sangat mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengkritisi pemegang kekuasaan politik. Paradoksnya, kemampuan media untuk menjaga akauntabiliti demokratis akhirnya tergantung pada institusi politik.

Tiga peranan politik media dalam keragaman demokrasi sebagai 'pasar ide' (*marketplace of ideas*), sumber informasi bagi warga, dan pengawas akauntabiliti publik memiliki fungsi yang sama dengan lembaga pemerintahan yaitu untuk melindungi warga negara. McQuail (2000) dalam teori normatif menyebutkan bahwa kinerja media mencakup 'tatanan sosial', 'kebebasan' dan 'kesetaraan' sebagai salah satu dari tiga nilai komunikasi dasar yang perlu diterapkan dalam organisasi media dan praktek jurnalistik. Walaupun tidak ada standar objektif tentang bagaimana untuk menyeimbangkan keperluan komunikatif partaikularistik dan kolektif. Bagi demokrasi yang sudah mapan telah menemukan solusi yang sangat berbeza untuk masalah ini, dengan campuran hak jurnalistik, di satu sisi, dan kewajiban media di sisi lain. Ketegangan antara kebebasan dan kepentingan publik diharapkan dapat mengatasi konflik dalam demokrasi baru. Dalam era transisi demokrasi, masyarakat sering dihadapkan pada perpecahan sosial, krisis identiti budaya dan bangsa yang berdampak pada integriti dan pembangunan bangsa.

William L. Rivers dan kawan-kawannya (Rivers 2003) mengatakan bahwa pada dasarnya, kondisi di dunia nyata mempengaruhi media massa, dan ternyata keberadaan media massa juga dapat mempengaruhi kondisi nyata dunia. Dengan lain kata, dunia mempunyai peranan dan kekuatan untuk mempengaruhi media massa; dan sebaliknya, media massa juga mempunyai peranan dan kekuatan yang begitu besar bagi dunia ini, terlebih dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dengan segala aspek yang terkandung di dalamnya. Oleh itu, dalam komunikasi melalui media massa, media massa dan manusia mempunyai hubungan saling ketergantungan dan saling memerlukan karena masing-masing saling mempunyai kepentingan, masing-masing saling memerlukan. Media massa memerlukan berita dan informasi untuk publikasi sama ada untuk kepentingan media itu sendiri mahupun untuk kepentingan orang atau institusi lainnya; pada lain pihak, manusia memerlukan adanya pemberitaan dan publikasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Negara adikuasa, Amerika Syarikat, juga tidak dapat melepaskan diri daripada media massa. Hai ini karena hubungan saling ketergantungan dan saling memerlukan. Pada satu sisi media massa memerlukan berita dan informasi tentang Amerika Syarikat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung agar fungsi dan peranan media massa dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Di lain sisi, negara Amerika Syarikat memerlukan media massa untuk mempublikasikan informasi dan berita mahupun untuk tujuan-tujuan serta kepentingan-kepentingan khusus dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau lainnya. Menurut catatan William L. Rivers dan kawan-kawan (Rivers 2003), pemerintah Amerika Syarikat menganggap bahwa pemberitaan melalui media massa itu sangat penting. Hal ini dapat dilihat daripada besarnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah federal Amerika Syarikat untuk publikasi atau pemberitaan kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik sebesar \$400 juta per tahun. Bahkan eksekutif mengeluarkan dana yang lebih besar untuk tujuan pemberitaan, publikasi, peliputan khusus, dan lain sebagainya. Hal ini memberikan indikasi betapa besar peranan dan kekuatan media massa bagi pemerintah Amerika Syarikat.

Demikian halnya dengan dunia politik di Amerika Syarikat, eksistensi politik Amerika Syarikat dan yang berkait juga tidak dapat melepaskan diri daripada keberadaan media massa sama ada di Amerika mahupun yang ada di luar Amerika. Publikasi melalui media massa sama ada cetak mahupun elektronik tentang hal-hal yang berkait dengan kepentingan-kepentingan politik dalam mahupun luar negara Amerika Syarikat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung sangat diperlukan oleh para pengamal mahupun ahli akademi bidang politik Amerika Syarikat. Demikian juga halnya dengan media massa, untuk kepentingan komunikasi pada umumnya, dan kepentingan media massa pada khususnya ataupun untuk kepentingan lainnya, pihak media massa sangat memerlukan informasi dan segala hal tentang politik Amerika Syarikat yang dapat dijadikan komoditi bagi media massa. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana hubungan saling ketergantungan dan saling memerlukan antara media massa dan kempen kepresidenan di Amerika Syarikat. Para pengamal, partaisan, pemerhati politik Amerika sama ada yang berada di Amerika Syarikat mahupun yang berada di luar Amerika Syarikat akan sangat memerlukan media massa sama ada sebagai sarana komunikasi dengan memberikan informasi mahupun sebagai sarana meyakinkan untuk kepentingan kempen dengan cara menyampaikan visi dan misinya untuk memikat rakyat agar memilih calon presiden

sebagaimana yang diharapkan oleh kumpulan kempen. Demikian juga pihak media massa akan sangat mmahutungkan dan memerlukan berita, informasi yang berkait secara langsung mahupun tidak langsung dengan kempen kepresidenan tersebut sebagai sumber berita utama atau bahan utama bagi pemberitaan atau jenis publikasi lainnya. Daripada contoh tersebut, dapatlah disampaikan suatu pemikiran akan adanya keterkaitan antara media massa dan berbagai pihak dalam pelaksanaan kempen kepresidenan Amerika Syarikat.

Jika kita ingin memahami dinamika transisi menuju demokrasi, fungsi dan kualitas lembaga-lembaga yang muncul daripada rejim baru, kita perlu mengambil kira media massa sebagai pusat struktur penengah. Tanpa akses media yang adil, pelaku politik, sama ada pemerintah, partai politik mahupun kelompok masyarakat awam tidak akan mampu untuk mendukung pergerakan dan pemilu sebagai mekanisme demokratis sehingga tidak akan melahirkan kekuasaan yang bermakna.

Komunikasi politik muncul daripada interaksi antara ahli politik terpilih, media dan warga negara yang mencakup seperangkat aturan yang kompleks, harapan normatif serta mengatur aktivitas rutin harian dalam menyebarkan pesan kepada masyarakat luas. Oleh itu, pendemokrasian komunikasi politik memerlukan lebih dari sekadar transformasi lembaga media dan praktek-praktek jurnalistik, tetapi juga melibatkan perubahan prilaku dan orientasi pelaku politik dan warga negara dalam proses ini.

Selanjutnya, peranan media dalam dalam era transisi dan saling ketegantungan antara pelbagai pihak. Merujuk kajian Voltmer (2006) terhadap media di pelbagai negara seperti Rusia, Afrika Selatan, Chili dan Taiwan. Mereka memiliki kesamaan masalah dan tantangan yang dihadapi iaitu pendemokrasian dan komunikasi politik. Pada saat yang sama juga terdapat perbezaan yang signifikan yang tidak dapat digeneralisasi hubungan antara media dan politik di negara demokrasi baru.

Apa yang menjadi persamaan dan perbezaan? Menurut Huntington (1991) kesamaan, semua negara di atas dimasukkan dalam 'gelombang ketiga' pendemokrasian dan dengan demikian harus mengelola transisi dalam keadaan yang sama. Pasca keruntuhan Uni-Soviet, muncul negara-negara demokrasi yang selama ini berada di bawah kuasa Soviet. Perubahan yang sangat cepat itu mejadi halangan untuk membentuk lembaga-lembaga demokrasi. Semuanya harus dilakukan pada waktu yang sama. Solusi

nyata untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan menerima model kelembagaan dari barat.

Secara historikal, keberadaan dan peranan komunikasi politik ternyata sudah berlangsung lama, sama ada di Amerika mahupun di Eropah. Pertama kali di Jerman, komunikasi politik bukan sahaja digunakan dalam penelitian tentang propaganda, melainkan sudah ke masalah opini publik. Di antaranya pada tahun 1922, penyelidikan Ferdinan Tonnies dan Walter Lipmann yang menyelidik tentang sifat opini publik pada masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh Begeot, Maine, Bryce, dan Graha Wallas di Inggeris yang mengkaji peranan media dalam pembentukan opini publik. Bahkan pada tahun 1927 Harold D. Lasswell, menulis tesis doktoral tentang *Propaganda Technique in the World War*, Wilbur Schramm (1980) menempatkan Laswell sebagai tokoh utama dalam studi komunikasi politik dunia. Langkah Laswell tersebut diikuti oleh murid-muridnya, seperti Ithiel de Sola Pool, V.O. Key dan Gabriel Almond. Untuk memahami dinamika komunikasi politik menurut Voltmer (2006), perlu diperhatikan tiga komponen besar, iaitu media, elit politik dan warga (citizen).

Sistem pemerintahan demokrasi seringkali diagung-agungkan karena ideologinya yang menempatkan publik sebagai prioriti. Ideologi demokrasi iaitu “daripada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi jargon yang seakan-akan memperlihatkan kekuasaan publik dalam mengatur pemerintahan. Dalam demokrasi ini, media memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Bahkan media dipandang sebagai pilar keempat demokrasi.

Media dan demokrasi merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya telah melewati sejarah yang panjang dan saling berhubungkait satu sama lain sejak zaman feudal hingga kini. Media tanpa adanya demokrasi akan mengalami kejumudan, karena media dapat bersuara manakala dimudahkan oleh sistem demokrasi. Begitu juga sebaliknya, demokrasi akan terlihat sinarnya manakala dimudahkan oleh media.

Demokrasi baru dapat dikatakan berjaya bila masyarakat telah menjadi golongan warga yang memiliki infomasi (*well informed*) dan dapat memberikan aspirasi politiknya dengan baik. Ertinya, masyarakat harus memiliki informasi yang cukup dalam menentukan keputusan politiknya dan bukan hanya asal pilih. Di sinilah media berperanan untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat guna membantu mereka menentukan pilihannya. Media bertanggung jawab memberikan informasi tentang para

kandidat daripada sisi yang paling objektif sehingga dapat menyihatkan persaingan politik di pemerintahan.

Edmund Burke menyebut media sebagai pilar keempat demokrasi. Karena itu, media bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengawal para pemegang kekuasaan seperti pemerintah, para pemilik modal, dan institusi-institusi lain yang sekiranya berpotensi mempengaruhi masyarakat. Fungsi media tersebut seharusnya juga dapat meningkatkan kesedaran institusi-institusi tersebut dalam melakukan aktivitasnya, karena apa yang dilihat media juga akan dilihat masyarakat.

Media menjadi sangat penting dalam demokrasi karena media massa diharapkan dapat menjadi penengah antara warganegara dengan pemerintah serta meningkatkan aspirasi politik warganegara. Oleh itu, media mesti menyiapkan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat melalui ruang publik, seperti ruang komentar, opini, surat pembaca dan seumpamanya.

Media memang berperan sebagai “*marketplace of ideas*”, iaitu sebagai wadah aspirasi tiap-tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat melalui media massa. Namun hal ini juga perlu dipersoalkan keberkesanannya, karena ditakutkan kebenaran yang terbangun malah berdasarkan siapa yang dapat menyampaikan pandangannya dengan paling baik. Hal itu tentunya akan merugikan orang lain dan berpotensi menyisihkan kebenaran yang sebenarnya.

Secara ringkas, media dalam demokrasi memiliki empat peran, iaitu (1) sebagai sumber informasi, (2) sebagai *watchdog*, (3) sebagai mediator, (4) sebagai advokat. Keempat peran media massa tersebut merupakan tanggung jawab para pengelola media yang harus dipenuhi dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Empat peran media massa di atas memaparkan kuasa media dalam negara demokrasi. Masalah yang dihadapi media adalah kebebasan. Media tidak akan pernah berdiri sendiri, sebab media adalah sebuah industri yang memiliki kepentingan ekonomi serta memerlukan subsidi dana yang besar, sehingga media pasti akan selalu dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang menguasainya.

Sama dengan industri-industri lainnya, media memiliki kepentingan ekonomi dan kompetisi media yang sangat kuat sehingga membuat media selalu berusaha agar informasinya dapat menarik banyak massa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan *hyperadversarialism*, di mana para jurnalis menjadi agresif dalam mengkritik pemerintah agar mendapatkan berita

yang kontroversial sehingga dapat menarik perhatian publik. Pada akhirnya, media tidak lagi mencari sebuah kebenaran, melainkan berlumba-lumba membuat spekulasi agar beritanya lebih menarik. *Hyperadversarialism* ini juga menempatkan berita politik seperti *infotainment*, karena selalu mengambil sisi dramatisasi dan konfrontasi politik yang berlaku. Kebebasan media dalam demokrasi juga sebenarnya patut dipersoalkan. Apakah media atau media memang benar-benar bebas daripada tekanan kelompok-kelompok tertentu atau malah sebenarnya ditekan tapi sengaja ditutup-tutupi. Inilah yang kemudian menjadi kritik Marxian yang menyebut kebebasan media sebagai *ideological hoax*, di mana sebenarnya media massa bagaimanapun tidak akan pernah terbebas daripada penguasaan kaum borjuis. Kebebasan media tersebut hanya dijadikan topeng untuk melakukan hegemoni dan mendukung industri medianya.

Poin terpenting yang perlu dipahami adalah tidak akan pernah ada negara yang dapat mengaplikasikan demokrasi secara utuh, karena demokrasi sendiri bukan semata-mata lahir daripada gerakan masyarakat melainkan juga didorong oleh elit-elit politik yang ada di belakangnya. Dengan demikian, demokrasi tidak akan pernah berjalan sempurna, pasti akan selalu ada intervensi kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan media. Bagaimanapun media tidak akan pernah berdiri sendiri dan netral seutuhnya, media pasti akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sama ada kepentingan politik maupun ekonomi.

2.2 Internet sebagai media baru

Di antara persoalan yang dihadapi negara-negara demokrasi sekarang adalah munculnya sikap apati warga terhadap politik. Warganegara melihat partai politik sudah *stagnant*, bersifat reaktif, tidak inspiratif. Oleh itu, banyak warga tidak tertarik untuk berpartisipasi, tidak mahu ikut anggota partai. Mereka sangat skeptikal, frustrasi melihat kondisi politik, sinis terhadap perilaku elit (Dahlgren 2011).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi telah melahirkan media alternatif yaitu internet. Internet dapat menjadi sarana bagi warganegara untuk melakukan partisipasi politik seperti melakukan kawalan, beropini, melakukan protes sebagai salah bentuk partisipasi politik dalam era moden. Namun masalahnya adalah apakah generasi muda sudah memanfaatkan internet sebagai sarana partisipasi politik.

Kirk dan Schill (2011) menjelaskan bahwa *Internet is not an active medium, one that requires that user to seek information rather than passively receive it*. Internet bagaikan dua sisi mata wang. Bagi ahli politik, internet dapat menjadi wahana atau media untuk memperlancar akses (*sybercampaign*) dengan warga dan mengurangkan biaya politik. Sebaliknya, bagi masyarakat internet dapat pula menjadi media untuk mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan para elit (Norris 2001).

Bagi *Mobilization theorists* internet dapat menjadi wadah partaisipasi politik dengan biaya murah (*lowcost*), langsung dan meningkatkan partaisipasi warga, mengurangi biaya komunikasi, serta mempercepat hubungan baik dengan masyarakat lainnya mahupun dengan pelaksana pengundian. Oleh itu, banyak kadidat menggunakan media online seperti blog, facebook, twiter, e-mail sebagai medium *cybercampaign* selama kempen Pilkada. Ruang lingkup *cyberspace* luas tidak mempunyai lingkup yang terbatas. *Cyberspace* dapat memberikan ruang atau cara berkomunikasi politik baru tanpa adanya kendali kuasa tertentu, karena bersifat terbuka, bahkan *cyberspace* lebih dianggap demokratis. Dengan demikian partaisipasi politik masyarakat akan lebih tinggi karena elit semakin terbuka untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan konstituennya.

Dalam beberapa kajian tentang peranan internet dalam proses demokrasi seperti Abramson dan kawan-kawan (1988) menjelaskan bahwa ICT sangat bermanfaat dalam proses demokrasi. Denny (Republika, 26/3) menjelaskan bahwa media sosial dapat berperan sebagai roda pendorong gerakan demokrasi. Selanjutnya, Donk dan kawan-kawan (1995), Hacker dan van Dijk (2000) dan Hoff, Horrocks dan Tops (2000), menyebutkan bahwa ICT dapat menguatkan hubungan antara elit dengan warga. Bahkan Norris (2001) menjelaskan bahwa internet dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan masyarakat madani.

Merujuk Rahim (2010), Saleh dkk., (2005), media internet telah merubah landskap politik. Internet telah menjadi sumber dan saluran informasi dalam meningkatkan partaisipasi warga dalam pengundian umum. Sedangkan dalam kajian yang dilakukan oleh Kirk and Schill (2011) terhadap pengundian presiden Amerika tahun 2008 menunjukan bahwa ICT telah membantu warga lebih dekat dengan kandidat dan meningkatkan partaisipasi warga. Hasil yang sama juga ditemukan dalam beberapa penyelidikan yang dilakukan oleh Jennings dan Zeitner (2003), Zhang & Chia (2006), Scheufele & Nisbet (2002), Koch (2005), Pollat (2005), Mamber (2000), Polat (2005), Moy, *et.al.* (2005), Shah,

Kwak & Holbert (2001) bahkan menurut Dahlgren, 2005, internet dapat mengembangkan budaya sivil (*civic culture*) dan Coleman & Bumler (2009) tentang *e-democracy* dapat mendorong proses demokrasi.

Internet dapat memunculkan rasa optimis warga dalam demokrasi. Internet sangat penting dalam politik karena internet dapat menjadi media alternatif untuk warga berpartisipasi yang bersifat ekstra parlimen. Media internet sebagai wahana partisipasi ekstra parlimen dapat dilihat dalam kegiatan politik Pengundian Presiden Amerika Serikat tahun 2008 dan 2012. Kemudian di Afrika Utara dan Timur Tengah tahun 2011 (Coleman dan Blumler 2009).

Bagi bangsa Indonesia yang masih berada dalam proses pendemokrasian, ternyata perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai optimisme akan peran pentingnya internet di masa depan sebagai media komunikasi utama, yang menawarkan berbagai kemudahan di berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk politik dan demokrasi. Pengguna internet di Indonesia sekarang berjumlah lebih kurang 60 juta orang. Hal ini juga berdampak pada komunikasi politik dengan media internet (*cyberpolitic*). *Cyberpolitic* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pengundian presiden tahun 2004, 2009, dan 2014 semua kandidat telah menggunakan *cyberpolitic* dalam melakukan kampanye. Hal yang sama juga telah digunakan pula oleh kandidat kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kampanye melalui *cyberpolitic* ini diperbolehkan di Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 pasal 56 poin c tertulis bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui: penyebaran melalui media cetak dan media elektronik. Hal ini cukup jelas bahwa peranan teknologi informasi merupakan keperluan yang cukup vital termasuk dalam hal pengundian kepala daerah.

1. LANDASAN TEORI

3.1 Teori Media

Media sebagai salah satu aktor dalam komunikasi politik ianya mempunyai peranan penting dan strategik. Karena media boleh menjadi penghubung antara aktor-aktor lainnya seperti, pemerintah, elit politik, dan warganegara. Namun Cook (1998) mengatakan media bukan hanya saluran penghubung antara elit politik dengan warga, tetapi media merupakan aktor yang aktif dalam merancang pesan-pesan politik. Yang jauh lebih penting dari itu

ialah, bagaimana media menyampaikan informasi politik sehingga ia mempunyai kesan kepada warga. Sejalan dengan pandangan tersebut, Voltmer (2008) menyebutkan bahwa peranan media bukan hanya sebagai saluran penyampaian pesan elite kepada warga, tetapi warga aktif juga dalam melakukan komunikasi politik. Media adalah saluran yang menghubungkan antara kata dengan dunia (words to world) begitu kata McNair (2011).

Media lama seperti surat khabar dan televisi merupakan perpanjangan fikiran manusia. Ertinya, media sebagai sebuah fikiran manusia yang diciptakan untuk memaksa manusia lain untuk dikuasi oleh media. Manakala media baharu (internet) berhubungkait dengan interaksi sosial dan integriti sosial (McQuail 2000; McLuhan 2011).

Media diakui mempunyai peranan strategik dan penting dalam proses demokrasi. Bahkan media menjadi pilar ke empat dalam sesebuah negara demokrasi (Voltmer 2008). Mengikut pandangan Tabroni (2012), ada lima fungsi media dalam proses demokrasi, iaitu; pertama, media mesti memberikan informasi kepada warga tentang apa yang wujud di sekitarnya. Kedua, media mesti melakukan pendidikan kepada warga melalui pemberitaan yang objektif. Ke tiga, media mesti memberi ruang kepada warga untuk melakukan diskusi dan perbincangan. Ke empat, media melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemerintahan, dan ke lima, media harus berperanan sebagai institusi rujukan dalam pemilu umum.

Walaupun kemajuan sains teknologi komunikasi sudah melahirkan media baharu (internet), namun peranan media berita tradisional, seperti surat kabar dan televisi mempunyai hubungan positif dengan civic dan keterlibatan warga dalam politik. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Eveland dan Scheufele (2000) menunjukkan bahwa penggunaan media lama mempunyai korelasi positif dan signifikan dengan partisipasi politik dan pengundian. Sedangkan dalam kajian Weaver dan Drew (2001) menemukan bahwa penggunaan media lama dapat memberikan kesan positif kepada warga. Manakala Jeffres, Lee, Neuendorf dan Atkin (2007) menyebutkan bahwa pengguna media lama berhubung positif dengan aktivitas masyarakat dan modal sosial. Dalam kajian Norris (1996) mendapatkan pula bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media lama dengan partisipasi politik. Namun kajian yang dilakukan oleh Shah, Cho, Eveland, dan Kwak, (2005) menunjukkan corak berbeza, dimana penggunaan media tradisional tidak mempunyai kesan positif kepada partisipasi politik.

Selanjutnya, Quintelier & Visser (2008); Scheufule & Nisbet (2002); Shah, McLeod, dan Yoon (2001) dan Tolbert dan McNeal (2003) menguraikan bahwa media baru mempunyai pelbagai fungsi dalam komunikasi politik. Para pakar tersebut mengkaji analisis hubungan antara pengguna internet dan keterlibatan warga dalam politik, dan hasil kajiannya menunjukkan bahwa internet telah menjadi sumber berita politik utama generasi muda. Pandangan yang sama ditunjukkan oleh Shah et al. (2001), Xenos dan Moy (2007); Bimber, (2003) bahwa terdapat hubungan yang positif antara penggunaan internet dengan tingkat partisipasi warga dalam politik.

Oleh itu, Kirck dan Schill (2011) membagi pembahasan kajian internet kepada tiga bahagian, iaitu; *mobilization theorists*, *reinforcement theorists* dan *cyber skeptics*. Dalam pandangan *mobilization theorists*, internet dapat menjadi bentuk baru dari demokrasi langsung dan dapat meningkatkan partisipasi warga, mengurangi biaya komunikasi, dan menghubungkan warga dengan warga lainnya serta dengan suruhan jaya pemilu. Penyelidikan yang menggunakan *Mobilization theorists* menemukan hubungan positif antara penggunaan internet dengan keterlibatan warga (*civic engagement*). Hal ini disebabkan warga pengguna internet lebih berpengetahuan, lebih tertarik (*interested*), lebih berpartisipasi dalam politik dan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, berpartisipasi dalam pemilu (*vote*), berpartisipasi dalam kempen, suka mencari informasi politik dari banyak media (Jennings & Zeitner; Johnson & Kaye 2003; Wang 2007; Xenos & Moy 2007). Sedangkan menurut pandangan Dahlgren (2005), internet dapat meningkatkan *civic culture* warga, menjadi agensi social dan dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam proses demokratik.

Mengikut pandangan *reinforcement theorists*, bahwa internet dapat menguatkan pola-pola komunikasi yang sudah ada dan memberikan informasi kepada orang yang telah terlibat dalam proses politik. Pendek kata, orang-orang yang terlibat (*civic engagement*) akan menjadi lebih banyak melakukan akses pada penggunaan internet. Dalam penyelidikan Jennings dan Zeitner (2003) bahwa penggunaan internet membuat warga lebih aktif dalam masalah politik.

Sedangkan dalam pandangan *cyber skeptics*, konsep ini meyakini bahwa internet tidak mempunyai pengaruh atau pengguna internet mempunyai hubungan negatif dengan *civic engagement* (Norris 2001). Mengikut penyelidikan yang dilakukan oleh Zhang & Chia (2006) menemukan bahwa pengguna internet tidak berhubungan dengan partisipasi

politik. Sedangkan dalam kajian Scheufele & Nisbet (2002), internet hanya terhad pada orang yang telah berpengetahuan. Bahkan internet dapat menurunkan hubungan social. Walaupun ada pandangan cyber skeptic, menurut Kirk dan Schill (2011) internet berpotensi untuk meningkatkan partaisipasi warga.

Di samping konsep di atas, Norris (2001) mengatakan bahwa perlu pula dikaji konsep jurang digital. Norris membagi konsep jurang digital kepada tiga bahagian, iaitu jurang digital global, social dan demokrasi. Jurang digital secara global ditandakan dengan perbezaan mengakses internet antara masyarakat industri. Manakala Fuch dan Horak (2008) menghubungkan dengan kesenjangan material. Jurang sosial ditakrifkan sebagai jurang antara kaya-miskin, dan perbezaan penghasilan. Sedangkan jurang demokrasi bermaksud untuk mengkaji perbezaan antara mereka yang tidak boleh mahupun mereka yang boleh menggunakan peluang sumber cyber/digital untuk mengerahkan dan melibatkan diri mereka dalam kehidupan masyarakat. Mengikut Castells (2002); Dijk (2005); Fach *et.al* (2008), perbezaan struktur masyarakat adalah sebab utama wujudnya model jurang digital secara global, Jenis Kelamin, etnik, usia, pendapatan, pendidikan dan pengetahuan.

Anak muda menggunakan internet sebagai sebuah medium alternatif dan cara digital dalam partaisipasi politik. Internet sangat potensial dan mudah diakses dan biayanya rendah. Tahun 2007, pengguna internet di 27 negara uni-Eropah adalah 60 persen. 88 persen penggunaanya ialah anak muda berumur antara 16-24 tahun. Belanda 99 persen, Denmark, Finlandia dan Iceland 100 persen (Eurostat, 2007). Di Amerika Syarikat, generasi mudanya adalah pengguna internet paling berat di dunia. Bulan Mei 2008 purata pengguna internet warga Amerika adalah 73 persen. Pengguna internet di Indonesia sebanyak 70 juta orang. Dimana 90 persen adalah anak muda berumur antara 18-29 tahun (Pew Internet&American Life Project, 2008).

Wilson (2006) membagi jurang digital kepada lapan aspek, iaitu; akses fizikal (*phisycal access*), akses kewangan (*financial access*), akses kognitif (*cognitive access*), akses reka bentuk (*design access*), akses kandungan (*content access*), akses produksi (*production access*), akses kelembagaan (*institutional access*), dan akses politik (*political access*). Sedangkan Dijk (2006) membagi konsep jurang digital kepada empat bahagian, iaitu; *motivational access*, *material access*, *skill access* dan *usage access*.

2. ANALISIS DATA

Data yang dikumpul dikodkan untu dianalisis dengan menggunakan pakej statistik computer SPSS versi 21. Uraian data dilakukan secaa deskriptif dan inferensi. Uraian deskriptif dilaporkan bagi setiap item dalam jumlah persenan. Laporan deskriptif dibuat untuk melihat pada corak dan taburan penemuan kajian mengikut pemboleh ubah. Setiap item dalam pembeh ubah tersebut diperiksa dan penemuan telah dijelaskan. Semenrtara itu ujian inferensi telah dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibentuk.

Untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah bebas penggunaan media dengan perubahan norma kewarganegaraan telah digunakan ujian analisis hubungan. Kemudian untuk melihat hubungan antara perubahan norma kewarganegaraan dengan partaisipasi politik telah digunakan ujian analisis hubungan. Sedangkan untuk melihat hubungan pemboleh ubah tunggal dalam menjawab hipotesis, ujian regresi mudah telah digunakan melalui kaedah **enter**.

Sedangkan untuk melaporkan hubungan antara peboleh ubah dalam hipotesis, nilai **beta** (β) dibincangkan dalam menentukan kekuatan sesuatu pemboleh ubah mempengaruhi pemboleh ubah yang lain. Sementara itu nilai **R² perubahan** pula digunakan untuk menjelaskan sumbangan varian setiap pemboleh ubah dalam sesuatu hipotesis. Manakala **R² adjusted** pula diperjelaskan mengikut sumbangan varian bagi beberapa pemboleh ubah.

4.1 Kepemilikan Media

Berdasarkan hasil temubual dengan 384 responden (rujuk tabel 5.2), diperolehi bahwa sebanyak 79 persen responden mempunyai surat kabar di rumah, 94 persen responden mengatakan mempunyai televisi di rumah, manakala 87 persen responden mengatakan memiliki internet di rumah. Maknanya responden umumnya telah mempunyai media (surat kabar, televisi, dan internet) di setiap rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa responden sudah menjadikan media sebagai sumber informasi yang penting. Bahkan data kajian ini menunjukkan warga muda Kota Padang telah mempunyai internet melebihi purata nasional iaitu 65 persen. Untuk lebih jelasnya sila rujuk tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2 Kepemilikan Media

Media	Ya	Tidak	Jumlah
-------	----	-------	--------

	%	%	%
Surat Kabar	302 (79%)	82 (21%)	384 100
Televisi	362 (94%)	22 (6%)	384 100
Internet	336 (87%)	48 (13%)	384 100

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa generasi muda Kota Padang umum sudah memiliki media di rumah mereka masing-masing. Walaupun mereka memiliki televisi sebanyak 94 persen, namun generasi muda Kota Padang sudah memiliki internet sebanyak 87 persen. Angka ini melebihi purata nasional kepemilikan internet. Tingginya angka kepemilikan media ini menunjukkan bahwa generasi muda sudah memandang penting informasi dalam kehidupannya.

Berikutnya akan diuraikan kepemilikan media berdasarkan Jenis Kelamin (silahkan rujuk tabel 5.3), menunjukkan bahwa 70 persen responden laki-laki telah mempunyai surat kabar di rumah berbanding 30 persen tidak memiliki surat kabar di rumah. Sebanyak 95 persen responden laki-laki mempunyai televisi di rumah, hanya 5 persen yang tidak memiliki televisi di rumah. Kemudian 87 persen responden laki-laki memiliki internet di rumah berbanding 13 persen tidak memiliki internet di rumah.

Manakala responden perempuan, 74 persen mempunyai surat kabar di rumah berbanding 26 persen tidak memiliki surat kabar di rumah. Sedangkan responden perempuan yang mempunyai televisi di rumah sebanyak 93 persen, berbanding 7 persen yang tidak mempunyai televisi di rumah. Kemudian dilaporkan bahwa sebanyak 89 persen responden mempunyai internet di rumah, berbanding 11 persen yang tidak mempunyai

internet di rumah. Data kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan Jenis Kelamin tidak menjadi pembeza dalam kepemilikan media. Untuk lebih jelasnya, sila rujuk tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3 Jenis Kelamin dan Kepemilikan Media

Jenis Kelamin	Surat Kabar		Televisi		Internet	
	Bilangan		Bilangan		Bilangan	
	%		%		%	
	Y	Ti	Y	Ti	Y	Tidak
Laki-laki	a	dak	a	dak	a	
	1	71	2	12	2	32
	67		26		06	
	7	3	9	5	8	13%
	0%	0%	5%	%	7%	
Perempuan	1	3	1	10	1	16
	08	8	36		30	
	7	2	9	7	8	11%
	4%	6%	3%	%	9%	
Jumlah	2	10	3	2	3	48
	75	9	62	2	36	
	7	2	9	6	8	12%
	2%	8%	4%	%	8%	

Kemudian, dari segi latarbelakang pendidikan responden (rujuk tabel 5.4) menunjukkan bahwa 37 persen responden yang berpendidikan dasar tidak mempunyai surat kabar di rumah, berbanding 17 persen mempunyai surat kabar di rumah. Sebanyak 46 persen mengatakan tidak mempunyai televisi di rumah, hanya 21 persen yang memiliki televisi di rumah. Manakala 64 persen responden tidak mempunyai internet di rumah,

hanya dan 17 persen responden mempunyai internet di rumah. Data kajian ini menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan dasar (SD dan SMP) umumnya tidak memiliki media di rumah mereka masing-masing.

Sedangkan responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dilaporkan bahwa sebanyak 51 persen mempunyai surat kabar di rumah, berbanding 39 persen tidak memiliki surat kabar di rumah. Sebanyak 48 persen responden mempunyai televisi di rumah, sebanyak 45 persen tidak memiliki televisi di rumah. Kemudian sebanyak 51 persen responden telah memiliki internet di rumah, hanya 25 persen yang tidak mempunyai internet di rumah.

Tabel 5.4 Pendidikan dan Kepemilikan Media

Pendi dikan	Mempunyai		Mempunyai		Mempunyai Internet	
	Surat kabar		Televisi			
	Ya	Tid	Ya	Tida	Ya	Tidak
	%	ak	%	k	%	%
		%		%		
SD	15	3	18	0	16	2
	6%	3%	5%	0%	5%	4%
SMP	32	37	59	10	40	29
	11%	34	16	46%	12%	60%
		%	%			
SMA	141	43	17	10	172	12
			4			
	51%	39	48	45%	51%	25%
		%	%			
P. Tinggi	87	26	111	2	108	5

	32%	24	31	9%	32%	10%
		%	%			
Jumla	275	10	36	22	336	48
h		9	2			
	100	10	10	100	100	100%
	%	0%	0%	%	%	

Manakala responden yang berpedidikan tinggi, data kajian menunjukkan bahawa sebanyak 32 persen mempunyai surat kabar di rumah, berbanding 24 persen tidak mempunyai surat kabar di rumah. Sebanyak 31 persen responden mempunyai televisi di rumah, hanya 9 persen yang tidak memiliki televisi di rumah. Kemudian sebanyak 32 persen responden mengatakan mempunyai internet di rumah berbanding 10 persen yang tidak mempunyai internet di rumah. Untuk lebih jelasnya, sila rujuk tabel 5.4 di bawah ini.

Berdasarkan uraian data di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan latarbelakang pendidikan responden tidak menjadi faktor pembeza yang signifikan untuk kepemilikan media dalam kalangan generasi muda. Ini terlihat dari data bahwa responden yang berpendidikan dasar hanya mempunyai media surat kabar 17 persen, televisi 21 persen, dan internet 17 persen. Manakala responden yang berpendidikan menengah dan tinggi mempunyai surat kabar 83 persen, televisi 79 persen, dan internet 58 persen.

4.2 Penggunaan Media

Selanjutnya dari sisi kekerapan responden menggunakan media (rujuk tabel 5.5) menunjukkan bahawa sebanyak 57 persen responden membaca surat kabar kurang daripada 3 jam dalam seminggu, sebanyak 21 persen responden membaca surat kabar antara 4 hingga 7 jam seminggu. Kemudian 13 persen responden membaca surat kabar antara 8 hingga 11 jam seminggu, dan hanya 3 persen sahaja responden yang membaca surat kabar lebih daripada 15 jam seminggu. Artinya, majoriti responden hanya membaca surat kabar kurang daripada 3 jam seminggu.

Berkaitan dengan kekerapan responden menonton televisi dalam satu minggu, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 19 persen responden menonton televisi kurang dari 3 jam seminggu, sebanyak 27 persen responden menonton televisi antara 4 hingga 7 jam

seminggu, dan 14 persen responden menonton televisi antara 8 hingga 11 jam. Sedangkan responden yang menonton televisi antara 12 hingga 14 jam adalah 20 persen, sebanyak 20 persen responden pula menonton televisi lebih daripada 15 jam seminggu. Tegasnya, responden kajian ini umumnya menonton televisi antara 4 hingga 12 jam seminggu.

Untuk kekerapan responden melayari internet, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa sebanyak 17 persen responden melayari internet kurang dari 3 jam seminggu, sebanyak 18 persen responden melayari internet antara 4 hingga 7 jam seminggu. Kemudian responden yang melayari internet antara 8 hingga 11 jam seminggu adalah 22 persen. Manakala responden yang melayari internet antara 12 hingga 14 jam seminggu adalah 19 persen, dan responden yang melayari internet lebih daripada 15 jam seminggu adalah 24 persen.

Berdasarkan uraian kekerapan responden menggunakan media di atas, dapat disimpulkan bahawa nilai min tertinggi purata ($M=3.16$) berbanding menonton televisi ($M=2.96$), dan membaca surat kabar ($M=1.78$). Data ini menunjukkan bahawa telah terjadi perubahan penggunaan media dalam kalangan generasi muda, iaitu dari media tradisional (surat kabar dan televisi) kepada media internet. Untuk lebih jelasnya, sila rujuk tabel 5.5 dibawah ini.

Tabel 5.5 Penggunaan media dalam seminggu

Media	Waktu Penggunaan Media							Jumlah
	< 3 jam	4 -7 Jam	8 -11 Jam	12-14 Jam	> 15 Jam	I in	S P	
Surat	2	7	5	2	1	1	1	384
Kabar	19	9	0	2	4	.78	.01	100
	(57%)	(21%)	(13%)	(6%)	(3%)			
Televis	7	1	5	7	7	2	1	384

i	4	02	4	5	9	.96	.42	100
	(((2	(
	19%)	27%)	14%)	0%)	20%)			
Intern	6	6	8	7	9	:	1	384
et	5	8	4	4	3	.16	.41	100
	(((((
	17%)	18%)	22%)	19%)	24%			

Berhubungkait dengan informasi tentang kekerapan responden dalam **melayari internet** (sila rujuk tabel 5.6) menunjukkan bahawa sebanyak 77 persen responden laki-laki dan sebanyak 23 persen responden perempuan melayari internet kurang daripada 3 jam seminggu. Kemudian responden yang melayari internet antara antara 4 hingga 7 jam seminggu adalah sebanyak 69 persen responden laki-laki dan sebanyak 31 persen responden perempuan.

Manakala sebanyak 55 persen responden laki-laki dan sebanyak 45 persen responden perempuan responden melayari internet antara 8 hingga 11 jam seminggu. Sedangkan responden yang melayari internet antara 12 hingga 14 jam seminggu adalah sebanyak 61 persen responden laki-laki dan sebanyak 39 persen responden perempuan. Berikutnya, sebanyak 54 persen responden laki-laki dan sebanyak 46 persen responden perempuan melayari internet lebih daripada 15 jam seminggu. Berdasarkan uraian informasi diatas dapat disimpulkan bahwa umumnya responden menggunakan media lama (surat kabar dan televisi) dan media baru (internet) antara 4 hingga 12 jam seminggu. Untuk lebih jelasnya sila rujuk tabel 5.6 di bawah ini.

Lanjutan Tabel 5.6 (C) Jenis Kelamin dan melayari internet

Menonton televisi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-	Peremp	
	laki	uan	

< 3 Jam	50	15	65
	77%	23%	100%
4-7 Jam	47	21	68
	69%	31%	100%
8-11 Jam	46	38	84
	55%	45%	100%
12-14 Jam	45	29	74
	61%	39%	100%
> 15 Jam	50	43	93
	54%	46%	100%
Jumlah	238	146	384

Selanjutnya dari sisi latarbelakang pendidikan, responden yang kerap melayari internet antara 12 hingga 14 jam seminggu, adalah 37 persen responden yang berpendidikan tinggi, kemudian sebanyak 34 persen responden yang berpendidikan SMA, dan sebanyak 29 persen responden yang berlatarbelakang pendidikan dasar. Sedangkan responden yang melayari internet lebih daripada 15 jam seminggu adalah responden yang berpendidikan SMA iaitu 59 persen, responden yang berpendidikan tinggi sebesar 33 persen, dan terakhir responden yang berpendidikan dasar sebanyak 8 persen.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan latarbelakang pendidikan responden adalah menjadi faktor pembeza dalam melayari internet. Data kajian ini menunjukkan bahwa responden yang berlatarbelakang pendidikan menengah dan tinggi lebih dominan melayari internet daripada responden yang berpendidikan dasar. Untuk lebih jelasnya sila rujuk tabel 5.7 di bawah ini.

Lanjutan tabel 5.7 Pendidikan dan melayari internet

Pendidikan	Melayari internet				
	<3jam	4-7jam	8-11jam	12-14	>15jam
SD	7	3	4	4	0
	11%	4%	5%	5%	0%
SMP	9	10	25	18	7
	14%	15%	30%	24%	8%
SMA	33	36	35	25	55
	50%	53%	42%	34%	59%
Perguruan Tinggi	16	19	20	27	31
	25%	28%	24%	37%	33%
Total	65	68	84	74	93
	100	100	100	100	100.0%
	%	%	%	%	

4.3 Norma Kekewarganegaraan

Norma kewarganegaraan ini akan diuraikan secara berasingan dalam tiga sub dimensi, iaitu sub dimensi norma tanggungjawab kewarganegaraan (duty citizen), norma keterlibatan kewarganegaraan (engaged citizen), dan norma pematuhan kewarganegaraan (compliance citizen).

4.3.1 Norma Tanggungjawab kewarganegaraan

Norma tanggungjawab kewarganegaraan ini diukur dengan lapan item seperti yang tercatat dalam Tabel 5.12. Data menunjukkan bahwa diantara item dalam konstruk kewarganegaraan yang dianggap penting oleh responden adalah patuh kepada peraturan dan hukum yang berlaku purata (M=4.3), peduli terhadap tindakan jenayah (M=4.2), patuh membayar pajak (M=4.2), dan peduli terhadap pelanggaran moral (M=4.1). Dan ikut pilhan raya umum dengan nilai min (M=4.1). Untuk lebih jelas, sila rujuk tabel 5.12 di bawah ini.

Tabel 5.12 Tanggungjawab Kewarganegaraan

Aktivitas	San gat Tidak Penting	Ti dak Penting	Kura ng penting	Penting	Sangat Penting	MIN	SP
	Bila ngan (%)	Bi langan (%)	Bilan gan (%)	Bilangan (%)	Bilangan (%)		
Ikut engundi dalam Pemilu	5 (1%)	2 0 (5	42 (11%)	202 (53%)	115 (30%)	4.1	. 9
Ikut Pilkada	13 (3%)	%) 2	55 (14%)	201 (52%)	92 (24%)	3.9	1 .0
Ikut Memili Ketua RT	16 (4%)	3 (6	123 (32%)	161 (42%)	46 (12%)	3.5	1 .0
Ikut engundi Ketua RW	13 (3%)	3 8 (1	122 (32%)	161 (42%)	50 (13%)	3.5	1 .0
Taat hukum	9 (2%)	3 8 (1	21 (5%)	180 (47%)	166 (43%)	4.3	. 8
Taat embayar Pajak	8 (2%)	0%) 8 (2	29 (8%)	189 (49%)	144 (37%)	4.2	. 9

Peduli	5	%)	26	201	134		
dakan jenayah	(1%)		(7%)	(52%)	(35%)	4.1	
		13					.
		(3					8
		%)					
Peduli kepada							
akan melanggar							
Moral		13					.
		(3					
		%)					8
		18					
		(5					
		%)					

Kemudian diantara item yang secara relative dianggap kurang penting oleh responden adalah ikut mengundi dalam Pemilihan Kepala Daerah ($M=3.9$). Untuk pilihan ketua rukun tetangga ($M=3.5$), dan Pemilihan Ketua Rukun Warga ($M=3.5$).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa umumnya generasi muda masih patuh kepada nilai-nilai politik lama, seperti responden merasa wajib untuk ikut memilih dalam setiap pemilu umum, sama ada pemilihan umum nasional (Presiden, DPR, DPD), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) mahupun ditingkat bawah seperti pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga.

4.3.2 Norma Keterlibatan Kewarganegaraan

Umumnya diskusi di negara-negara demokrasi sekarang tertuju pada perubahan norma kewarganegaraan (citizenship norms) yang melanda pengundi muda, iaitu dari norma tanggungjawab kewarganegaraan (duty citizen) kepada suatu nilai baru iaitu norma keterlibatan kewarganegaraan (engaged citizen). Untuk mengenalpasti pola atau aksi generasi muda dalam norma baru tersebut, maka keterlibatan kewarganegaraan ini akan diukur dengan lapan aktiviti seperti yang tercatat dalam tabel 5.13.

Data pada tabel 5.13 menunjukkan bahwa diantara item dalam konstruk norma keterlibatan kewarganegaraan (engaged citizen) yang dianggap penting oleh responden adalah aktivitas dalam bidang sosial seperti, membantu orang kurang upaya (M=4.1), menjadi anggota aktif organisasi keagamaan (M=3.8), menjadi anggota aktif organisasi sosial (M=3.8), menjadi anggota aktif organisasi sukarela (M=3.8) dan menjadi anggota aktif organisasi alam sekitar dengan (M=3.7).

Sedangkan item yang relative dianggap kurang penting dalam konstruk norma keterlibatan kewarganegaraan adalah menjadi anggota organisasi Hak Asasi Manusia (M=3.5), menyuarakan sikap berbeza dengan pemerintah (M=3.4), dan beropini di media (M=3.3).

Kajian ini secara umum menunjukkan bahwa sudah terjadi transformasi nilai dari nilai-nilai politik tradisional ke nilai-nilai politik baru dalam kalangan warga muda. Fenomena perubahan ini adalah sebuah tantangan untuk pimpinan partai politik, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk media. Informasi lengkap tentang aktivitas keterlibatan kewarganegaraan ini, sila rujuk tabel 5.13 berikut ini.

Tabel 5.13 Aktivitas Norma Keterlibatan Kewarganegaraan

Aktivitas	Sa ngat Tidak Penting Bilangan (%)	Tidak Penting Bilangan (%)	Ku rang penting Bil angan (%)	Pen ting Bila ngan (%)	San gat Penting Bila ngan (%)	MIN	SP
Beropini di Media Massa	19 (5%)	52 (13)	13 0 (3 4%)	160 (42 %)	23 (6%)	3.3	.9
Menyuar an sikap politik yang berbeda	18 (5%)	47 (12)	131 (3 4%)	151 (39 %)	37 (10%)	3.4	1.0
	9	14					

Menolong OKU	(2%)	(4%)				4.1	.9
				218	111		
	9	21	32	(57	(29		
Menjadi anggota aktif gerakan sosial	(2%)	(5%)	(8 %)	%)	%)	3.8	.9
	14	14		217	69		
	(4%)	(4%)	68	(56	(18%	3.8	.9
			(18	%))		
Menjadi anggota aktif organisasi sukarela			%)				
				219	63		
	9	14	74	(57	(16%		
	(2%)	(4%)	(19	%))	3.8	.8
			%)				
Menjadi anggota aktif organisasi keagamaan			%)				
	12	23		217	70		
	(3%)	(6%)	74	(56	(18%	3.7	.9
			(19	%))		
Menjadi anggota aktif organisasi Alam sekitar			%)				
	24	28		202	48		
	(6%)	(7%)				3.5	1.0
			99	(53	(12%		
Menjadi anggota aktif organisasi			(2	%))		
			6%)				
				202	42		
			88	(53	(11%		
			(23	%))		

%)

4.3.4 Norma Pematuhan kewarganegaraan

Dalam proses perubahan demokrasi yang saat ini sedang menuju pematangan demokrasi (*mature democracy*), diduga keputusan politik responden kerap kali dipengaruhi faktor luaran, seperti adanya money politics, pressure, intimidasi, adanya family yang menjadi calon legislative. Faktor luaran ini menurut Michal Mann (2008) adalah sebagai sisi gelap demokrasi (*the dark side of democracy*).

Untuk mengetahui sejauhmana faktor luaran tersebut mempengaruhi keputusan politik responden, maka norma pematuhan kewarganegaraan ini akan diukur dengan lima item seperti yang tercatat dalam tabel 5.14. Data kajian menunjukkan bahwa diantara item dalam konstruk pematuhan kewarganegaraan (*compliance citizen*) yang dianggap penting oleh responden adalah adanya family yang ikut bertanding dalam pemilu umum ($M=2.1$) dan ikut pemilu karena ikut-ikutan sahaja ($M=1.9$).

Manakala item yang dianggap kurang penting adalah intimidasi ($M=1.8$), pressure dari pihak luar ($M=1.8$), dan politik wang ($M=1.7$). Untuk lebih jelasnya sila rujuk jadual 5.14 di bawah ini.

Jadual 5.14 Pematuhan Kewarganegaraan

Isu-Isu	Tidak Pernah Bilangan (%)	Jarang Bilangan (%)	Sekali-Bilangan (%)	Kerap Bilangan (%)	Sangat Kerap Bilangan (%)	IN	SP

Intimidasi	21	5	7	3	4	1	1.1
	8	7	5	0	(.8	
	(5	(((1%)		
Pressure	7%)	15%)	19%)	8%)			1.0
					4	1	
	21	7	6	2	(.8	
Money	8	1	8	3	1%)		1.1
Politics	(5	(((
	7%)	18%)	18%)	6%)	5	1	
					(.7	1.1
Family	2	4	6	2	1%)		
ikut Caleg	44	8	0	7		6	11.2
	(6	(((6	2	
	3%)	12%)	16%)	7%)	(.1	
					2%)		
Ikut-	16	6	1	4		1	
ikut-	4	4	05	5	1	1.9	
	(4	(((4		
	3%)	17%)	27%)	12%)	(
					4%)		
	2	6	6	3			
	09	3	0	8			
	(5	(((
	4%)	16%)	16%)	10%)			

KESIMPULAN

Sebagai rumusan, kajian ini telah memberikan satu perspektif baru dari segi usaha menjadikan penggunaan media dan perubah norma kewarganegaraan lebih berkesan kepada partaisipasi politik generasi muda. Media mempunyai pengaruh besar dalam mencorakkan dasar kerajaan dan juga pemikiran masyarakat. Ia membolehkan sesiapa yang memegang kuasa dan jawatan awam dinilai dan dipertanggungjawabkan. Ia menyediakan maklumat untuk orang ramai membuat keputusan serta menjadi medium perhubungan pelbagai pihak untuk pelbagai tujuan. Konsep media dan partaisipasi pun telah digunakan untuk menguji sejauhmana penggunaan media dan perubahan norma kewarganegaraan mempengaruhi partaisipasi politik dalam era transisi ke demokasi di Indonesia.

Kajian ini telah membantu mengenalpasti factor yang signifikan mempengaruhi partaisipasi politik generasi muda. Walaupun kajian tidak dapat memberikan jawapan

sepenuhnya kepada perubahan pola partisipasi politik, namun ianya merupakan lembaran baru dalam mengenal pasti factor yang mempengaruhi partisipasi politik generasi muda dalam era transisi ke demokrasi di Indonesia. Model media dan partisipasi politik yang baru ini, telah merungkaikan beberapa isu untuk melihat pola partisipasi politik. Melalui pengitegrasian pembolehubah iaitu penggunaan media dan norma kewarganegaraan telah menjadikan model komunikasi politik yang lebih mampan dan mantap bagi meramalkan pola partisipasi politik generasi muda dalam era transisi ke demokrasi. Walau bagaimanapun di sebalik faktor yang telah diuji dalam kajian ini, mungkin juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi pola partisipasi politik generasi muda. Maka untuk kajian akan datang adalah dicadangkan supaya faktor tersebut ditinjau untuk merungkaikan permasalahan komunikasi politik dalam era transisi ke demokrasi di Indonesia.

RUJUKAN

- Al-Quran dan Terjemahannya (2013). Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abramson, J.B., Arterton, F.C. dan Orren, G.R. 1988, *The electronic commonwealth: with impact of new media technologies on democratic politics*. New York: Basic Books.
- Adkeniz, Y. (2000) 'Policing the Internet: Concerns for Cyber-Rights', in Gibson, R. and Ward, S.(eds), *Reinvigorating Democracy?: British Politics and the Internet*, Aldershot: Ashgate.
- Althaus, S., & Tewksbury, D. 2000. Patterns of Internet and traditional news media use in a networked community. *Political Communication*, 17, 21-45.
- Alvarez, R.M. and Nagler, J. 2000 'The Likely Consequences of Internet Voting for Political Representation', Paper presented at the Internet Voting and Democracy Symposium, Loyola Law School, Los Angeles, CA.
- Azra, Azyumardi. 2012. Arab Spring. *Rupublika*, Rabu 13 September 2012.
- Bachmann, Kaufhold, Lewis, & Gil de Zuniga. 2010. News Platform Preference: Advancing the Effects of Age and Media Consumption on Political Partaicipation. *International Journal of Internet Science* 2010,5(1),34-47
- Bakker Tom P. dan Claes H. de Vreese (2011). Good News for the Future? Young People, Internet Use, and Political Partaicipation: *Communication Research* 38(4) 451-470: SAGE Publication.

- Bennet, Wells, dan Rank (2009). Young Citizens and Civic Learning: Two Paradigms of Citizenship in the Digital Age. Routledge, Vol. 13, No. 2, April 2009, 105-120.
- Bimber, B. (2008). 'The Internet and political fragmentation', in *Domestic perspectives on contemporary democracy*, ed. P.F. Nardulli, University of Illinois Press, Chicago, IL.
- Bostan, I. (2010). Democracy, Essential Element of the Electronic Government. *Journal of Computing*, Vol.2.
- [Boulianne, \(2009\)](#). Does Internet Use Affect Engagement? A Meta-Analysis of Research. *Political Communication*, 26(2), 193-211.
- Brian McNair, *An Introduction To Political Communication*, London and New York: Routledge, 2011, hlm. 5
- Cangara, H.F. (2009), *Komunikasi Politik*, Raja Grafindo Persada Press, Jakarta.
- Carpini, D.M.X (2004). Mediating Democratic Engagement: The Impact of Communications on Citizen's Involvement in Political and Civic Life. In L.L. Kaid (Ed.), *Handbook of Political Communication* (pp.395-434). Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum.
- Castells, M. (2002; 2009). *Communication Power*. Oxford: oxford University Perss.
- Cook. 1998. Public Policy and Political Economy Professional Issues. *American Behavioral Scientist*. SAGE
- Curran, J. (1991). Mass Media and Democracy. A reappraisal, in Curran and M. Gurevitch (eds) *Mass media and society*. London: Arnold, 82-117.
- Dahlgren, P. (2011). *Young Citizens and Political Partaicipation: On Line Media and Civic Cultures*. New York: Columbia University Press.
- Dalton, R. J. (2008a). Citizenship norms and the expansion of political partaicipation. *Political Studies*, Washington, DC: CQ Press. (56).
- Dalton, R. J. (2008b). *The good citizen. How a younger generation is reshaping American politics*. Washington, DC: CQ Press.
- Darren G. Lilleker dan Nigel Jackson (2008), "Politicians and Web 2.0: the current bandwagon or changing the mindset?" *Web 2.0: an International Conference*.
- De Zuniga et al., 2009. Who interacts on the Web?: The intersection of users' personality and social media use. [Computers in Human Behavior Volume 26, Issue 2](#), March 2010, Pages 247–253

- Diamond dan Gunther. 2001. Introduction: Politics, Society, and Democracy in Latin America. Latin America, 1-70. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Dijk, V (2006). *Political discourse and political Participation*, SAGE Publication.
- Dimitrakopoulos, D. (2008). Norms, Strategies and Political Change: Explaining the Establishment of the Convention on the Future of Europe. SAGE. University of London, UK .
- Doorenspleet, R. (2006). *Democratic Transition: exploring the structural sources of the fourth wave*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Ferdinand, P. (ed.) (2000) *The Internet, Democracy and Democratization*, London: Frank Cass Publishers Ltd.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*, New York: Free Press.
- Inglehart and Welzel (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*: Cambridge; Cambridge University Press.
- Kwak, N., Poor, N., & Skoric, M. M. (2006). Honey, I shrunk the world! The relation between Internet use and international engagement. *Mass Communication & Society*, 9(2), 189-213.
- Mann, M. (2005). *The Dark Side of Democracy: explaining ethnic cleansing*. Cambridge: University Press.
- Norris, P. (2003). Tuned out voters? Media Impact on Campaigns. *Ethical Perspectives*, 9(3), 200 - 221. Retrieved February 24, 2008.
- Oates, S. (2008). *Mass Media and Political Communication in New Democracies*. New York. Routledge.
- Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. The 2006 Johan Skytte prize lecture. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137-174.
- Qientlier E., Vissers S. (2008). *The Effect of Internet Use on Political Participation*. Social science computer review. SAGE Publication. Volume 26 Number 4.
- Quintelier, E. (2007). *The Effect Of Internet Use On Political Participation*. Social Science Computer Review. SAGE Publication.

- Rahim (2010). Keputusan Pemilu Umum ke-12. *Jurnal Komunikasi*. 26(2): 1-15.
- Rahim (2010), *Citizenship Norms and the Participation of Young Adults in a democracy*, final draft.
- Rahim (2012), *Citizenship Norms and the Participation of Young Adults in a Democracy*, Paper, presented, 2012.
- Verba, S., & Nie, N. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. New York: Harper & Row.
- Voltmer, K., (2008). *Mass Media and Political Communication in New Democracies*. Routledge. London.
- Wang, V. (2007). *What changes online participation in politics? Asian Governments and Politics*. International Relations Comparative Politics. Cambridge, MA. MIT Press.
- Zhang, W., & Chia, S.C. (2006). The effect of mass media use and social capital on civic and political participation. *Communication studies*, 57(3), 277-297.
- Zmerli, Sonja (2009). *Social Capital and Norms of Citizenship: an Ambiguous Relationship*. SAGE.
- Zukin, C., Keeter, S., Andolina, M. W., Jenkins, K., & Carpini, M. X. D. (2006). *A New Engagement? Political Participation, Civic Life, and the Changing American Citizen*. New York, New York: Oxford.